

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

(Studi Pengelolaan Dana Desa di Desa Maringgai Kecamatan
Labuhan Maringgai Lampung Timur)

SKRIPSI

**ISMIATUN
NPM : 2051030246**



Program Studi Akuntansi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H / 2024 M

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

(Studi Pengelolaan Dana Desa di Desa Maringgai Kecamatan
Labuhan Maringgai Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :
ISMIATUN
NPM.2051030246

Program Studi : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : Dr. Hanif, S.E., M.E
Pembimbing II : Ersi Sisdianto M.Ak., CSRP

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Dalam pengelolaan keuangan sektor publik pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Salah satu organisasi sektor publik sendiri adalah pemerintah desa yang setiap tahunnya mendapat dana desa yang nilainya cukup besar. Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan langsung oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik menurut perspektif islam terkait pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif asosiatif dengan jumlah sampel sebanyak 97 responden yang merupakan masyarakat Desa Maringgai. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 23. Pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* menggunakan rumus slovin. Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sektor publik dan secara simultan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sektor publik di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Menurut perspektif islam akuntabilitas dan transparansi merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan pemerintah desa (*ulil amri*) sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, namun dalam pelaksanaannya manusia selalu diawasi oleh Allah SWT sehingga menjadikan manusia lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, pengawasan, pengelolaan keuangan sektor publik, dana desa.

ABSTRACT

In public sector financial management, the government strives to continuously improve transparency, efficiency and accountability. One of the public sector organizations is the village government, which annually receives a large amount of village funds. Good financial management is one that applies the principles of transparency and accountability as well as direct supervision by the community. This study aims to determine the effect of transparency, accountability, and supervision on public sector financial management from an Islamic perspective related to village fund management. This research was conducted in Maringgai Village, Labuhan Maringgai District, East Lampung Regency.

This study uses a quantitative approach method with a sample size of 97 respondents who are the community. The data for this study were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression analysis with the SPSS 23 program. Sampling using purposive sampling and snowball sampling techniques using the slovin formula. The results of this research data show that transparency, accountability and supervision individually affect public sector financial management and simultaneously transparency, accountability and supervision affect public sector financial management in Maringgai Village, Labuhan Maringgai District, East Lampung Regency. According to the Islamic perspective, accountability and transparency are a mandate that must be carried out by the village government (ulil amri) as an accountability to the community and supervision is not only carried out by humans, but in its implementation humans are always supervised by Allah SWT so that it makes humans better at carrying out their duties.

Keywords: transparency, accountability, supervision, public sector financial management, village funds.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismiatun
NPM : 2051030246
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Menurut Perspektif Islam (Studi Pengelolaan Dana Desa di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2024
Penulis,



Ismiatun
NPM. 2051030246



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Menurut Perspektif Islam (Studi Pengelolaan Dana Desa di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **Ismiatun**
NPM : **2051030246**
Program Studi : **Akuntansi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hanif, S.E., M.M.
NIP.197408232000631001

Pembimbing II

Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak., CSRP
NIP.198611102019031012

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

A. Zuliansyah, S.Si., M.M
NIP.198302222009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Surainin, Sukarane I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Menurut Perspektif Islam (Studi Pengelolaan Dana Desa di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)” disusun oleh **Ismiatun, NPM: 2051030246**, Program Studi Akuntansi Syariah. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua : Dr. Wahyu Iryana, M.Ag

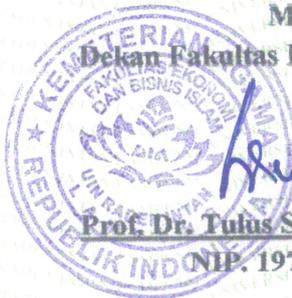
Sekretaris : Adhe Risky Mayasari, M.Pd

Penguji I : Vicky F. Sanjaya, M.Sc

Penguji II : Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak., CSR

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Survanto, M.M., Akt., C.A

NIP. 19700920200811008

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(Q.S Yasin Ayat 40)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya yaitu nikmat Iman, Islam, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahku (Suwandi) terimakasih untuk semua yang ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terimakasih selalu mengiringi langkahku dengan doa-doa mu dan terimakasih tak terhingga sudah bekerja keras tanpa lelah serta tanpa pamrih yang engkau berikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan serta keberkahannya kepada kita.
2. Ibuku (Musringatun) yang sangat aku sayangi, yang selalu mengiringi langkahku dengan doa tulus disetiap sujudmu dan terimakasih tak terhingga atas segala jasa, pengorbanan dan pendidikan yang telah memberikan bekal moral dan material serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan serta keberkahan-Nya kepada kita semua.
3. Untuk kakakku dan adikku yang aku sayangi, Iswandari, Azkiatul Zahro, Syafira Alyatul Ulya dan Falisha Azzahira sebagai penyemangat dalam menyelesaikan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Ismiatun atau yang akrab dipanggil Ismi merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan di desa Sriminosari 23 April 2001. Ismiatun merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suwandi dan Ibu Musringatun. Ismi memiliki satu kakak perempuan yang bernama Iswandari dan satu adik perempuan yang bernama Azkiatul Zahro.

Adapun pendidikan yang sudah ditempuh oleh Ismiatun sampai detik ini, dimulai sejak bersekolah di Taman Kanak-Kanak Harapan Jaya 2 Sriminosari, Labuhan Maringgai Lampung Timur. Lulus pada Tahun 2007. Dilanjutkan bersekolah di SD Negeri 02 Sriminosari, Labuhan Maringgai Lampung Timur. Lulus dan menerima ijazah pada Tahun 2013. Dilanjutkan menempuh pendidikan di SMP N 01 Labuhan Maringgai Lampung Timur. Lulus pada Tahun 2016. Dilanjutkan pendidikan di SMKS Darul Hidayah Labuhan Maringgai Lampung Timur. Lulus pada Tahun 2019. Kemudian penulis sempat bekerja di PT. PNM Mekaar (BUMN) sebagai *Account Officer* selama sepuluh bulan. Pada Tahun 2020 penulis menempuh pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah sampai saat ini.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Gedung Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

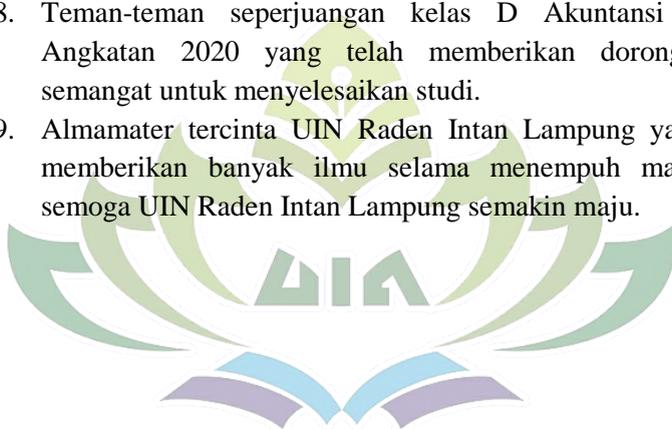
Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Menurut Perspektif Islam (Studi Pengelolaan Dana Desa di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)”**.

Skripsi ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak serta tidak mengurangi banyak rasa terima kasih pada semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt, C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Hanif, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Ersi Sisdianto M.Ak., CSRP. Dosen Pembimbing II yang telah membimbing , menasehati, dan juga memberikan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengabdian dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

6. Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian di Desa Maringgai.
7. Skripsi ini didedikasikan untuk sahabat-sahabatku yang juga berperan dalam segala proses penyelesaian skripsi ini yaitu Putri Wulandari, Dina Putri Febriani, Difa Putri Salma, Juliya Maulina, Sinta Anisa, Siti Safitri, Nuryani, Alfia Nursahid Khusnul Khotimah dan Muhammad Shaleh. Terimakasih telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan skripsi ini, dan terimakasih sudah menjadi sahabat yang luar biasa dimana tidak bisa kujelaskan betapa bersyukur aku memiliki kalian.
8. Teman-teman seperjuangan kelas D Akuntansi Syariah Angkatan 2020 yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu selama menempuh masa studi semoga UIN Raden Intan Lampung semakin maju.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS . 23	
A. Teori Yang Digunakan	23
1. Stewardship Theory.....	23
2. Teori Max Weber	24
3. Transparansi	25
4. Akuntabilitas	30
5. Pengawasan	37
6. Pengelolaan Keuangan Sektor Publik	41
B. Kerangka Pemikiran	45
C. Pengajuan Hipotesis	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Waktu dan Tempat Penelitian	53
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data.....	54

1. Populasi	54
2. Sampel	55
3. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Definisi Operasional Variabel	56
E. Instrumen Penelitian	59
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	59
G. Uji Prasyarat Analisis	60
1. Uji Normalitas	60
2. Uji Multikolinieritas	60
3. Uji Heteroskedasitas	60
H. Uji Hipotesis	61
1. Analisis Regresi Linear Berganda	61
2. Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	62
3. Uji Statistik t (Parsial)	62
4. Uji Statistik f (Simultan)	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	65
B. Deskripsi Data Penelitian	65
C. Analisis Statistik Deskriptif	67
D. Uji Instrumen	68
1. Uji Validitas	68
2. Uji Reliabilitas	70
E. Uji Prasyarat Analisis	71
1. Uji Normalitas	71
2. Uji Multikolinieritas	72
3. Uji Heteroskedastisitas	73
F. Uji Hipotesis	75
1. Analisis Regresi Linear Berganda	75
2. Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	77
3. Uji Statistik t (Parsial)	78
4. Uji Statistik f (Simultan)	80
5. Pembahasan Hasil Penelitian	81
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Rekomendasi	92

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Penelitian Terdahulu.....	13
3.1	Pengukuran Skala Likert	59
4.1	Jenis Kelamin	66
4.2	Usia.....	66
4.3	Pekerjaan	67
4.4	Analisis Statistik Deskriptif	67
4.5	Uji Validitas	69
4.6	Uji Reliabilitas.....	71
4.7	Uji Kolmogrof-Smirnov	72
4.8	Uji Multikolinieritas	73
4.9	Uji Heterokeastisitas Glejser	75
4.10	Analisis Regresi Linear Berganda	76
4.11	Uji Koefisien Determinasi	77
4.12	Uji Signifikansi Parsial.....	78
4.13	Uji Signifikansi Simultan	80



DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Pemikiran	45
4.1	Uji Heteroskedastisitas ScatterPlot.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada penulisan judul skripsi ini, penulis menuliskan makna kata perkata untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud yang terdapat pada judul penelitian. Dengan mempertegas judul penelitian secara rinci akan menghindari salah pengertian dalam memahami maksud dan untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai yang dikehendaki penulis. Adapun judul skripsi ini yakni : **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Menurut Perspektif Islam (Studi Pengelolaan Dana Desa di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur).”** Berikut penjelasan makna kata perkata dalam judul skripsi:

1. **Transparansi** adalah sistem informasi yang dikembangkan sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan publik. Transparansi merupakan keterbukaan secara menyeluruh terkait informasi dalam proses operasional sumber daya publik.¹
2. **Akuntabilitas** diartikan sebagai keharusan untuk mempertanggungjawabkan atau memberikan penjelasan atas kinerja seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.² Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang terhadap pihak yang berwenang atas kinerja yang dilakukan.

¹ Oktarini Khamilah Siregar, Hasrul Azwar Hasibuan, andAstriNatasianu,“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 1 Tanjungbalai,” *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 10, no. 1 (2019): 57–71, <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/573>.

² Idhar Yahya, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah,” *Jurnal Sistem Teknik Industri* 7, no. 4 (2006): 27–29.

3. Pengawasan adalah proses mengamati seluruh kegiatan organisasi untuk mengumpulkan data agar dapat mengetahui kesulitan dan ketercapaian tujuan organisasi³
4. Pengelolaan Keuangan Sektor Publik adalah proses manajemen keuangan dimana terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan rangkaian kegiatan ataupun usaha untuk mencapai tujuan organisasi.⁴
5. Dana Desa adalah dana yang sumbernya dari APBN yang ditujukan untuk desa melalui APBD kabupaten atau kota setiap tahunnya.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pengelolaan keuangan sektor publik melibatkan berbagai lembaga dan proses dalam pelaksanaannya untuk memastikan alokasi, penggunaan dan pertanggungjawaban dana publik dilaksanakan dengan baik. Dalam pengelolaan keuangan sektor publik pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Reformasi kebijakan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan keuangan sektor publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*),⁶ namun tantangan seperti pengelolaan keuangan yang tidak efektif masih menjadi fokus perhatian. Organisasi sektor publik sering dianggap sebagai sarang dari inefisiensi, sumber kebocoran dana dan sumber keborosan sehingga timbul

³ Said Muhammad Rizal and Radiman Radiman, "Pengaruh Motivasi, Pengawasan, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai," *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 2, no. 1 (2019): 117–28, <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3649>.

⁴ Boedijono Boedijono et al., "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 4, no. 1 (2019): 9–20, <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>.

⁵ Fajar Panuluh, "Buku Pintar Dana Desa," *Proposal SIMLITAMAS*, 2020, 8–37.

⁶ Ikonomika Jurnal Ekonomi et al., "Sistem Kompensasi Pns Berbasis Kinerja" 1, no. April (2016): 92–104.

permintaan agar organisasi sektor publik lebih memperhatikan kualitas dan profesionalitas.⁷

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan desa merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berhubungan dengan pembangunan dan pelayanan publik. Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak internasional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbedaan sistem pemerintahan dari sentralisasi pada orde baru desentralisasi membuat perubahan kebijakan dalam wewenang pemerintahan daerah. Sistem sentralisasi merupakan sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah dalam pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia, sedangkan sistem desentralisasi adalah sistem yang pemerintah pusatnya memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatasi pembangunan yang belum merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.⁸

Desa merupakan lingkup terkecil dari suatu pemerintahan Republik Indonesia. Walaupun demikian, desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan, ketika pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi masyarakat desa dapat dikatakan berhasil. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat

⁷ Irma Setiyaningrum and Isyroah, "The Influence of Accountability, Transparency, and Control Towards Budgeting Performance of Value for Money Concept At Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta," *Jurnal PROFITA: Kajian Ilmu Akuntansi* 5, no. 3 (2017): 1–20.

⁸ N0 6 UU, "Undang - Undang N0 6 Tahun 2014," 2014, 1–71.

mengarahkan serta mengawasi setiap kebijakan ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah desa agar nantinya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat umum maupun pemerintah. Undang-Undang desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mempunyai tujuan percepatan dalam pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut sejak Tahun 2015 pemerintah memberikan Anggaran Dana Desa kepada setiap wilayah desa di Indonesia. Dana Desa merupakan dana yang sumbernya dari APBN yang ditujukan untuk desa melalui APBD kabupaten atau kota setiap tahunnya.⁹

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa kemudian dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur dengan jumlah untuk penduduk sebesar 25%, luas wilayah 10%, angka kemiskinan 35% dan indeks kesulitan geografis 30% yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Setiap wilayah desa memperoleh Dana Desa yang cukup besar bahkan dapat mencapai satu miliar rupiah. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian bahwa setiap wilayah desa mendapatkan dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya relatif

⁹ Khavid Normasyhuri, Tulus Suryanto, and Riza Prayoga, "Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs): Tinjauan Ekonomi Islam," *RELASI: Jurnal Ekonomi XVII*, no. 2 (2012): 173–85.

tinggi.¹⁰ Pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan.

Transparansi merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik, dimana pemerintah diharuskan untuk terbuka dalam menyediakan informasi terkait kegiatan pengelolaan keuangan ataupun sumber daya publik bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan publik. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi baik informasi berupa *financial*, ataupun informasi lain yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pengelolaan keuangan publik yang baik melibatkan penyajian informasi yang jelas dan akurat yang mudah diakses oleh publik, dengan adanya transparansi akan meminimalisir tingkat kecurangan dan meningkatkan kredibilitas pemerintah dimata masyarakat.¹¹

Adapun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik merupakan salah satu standar administrasi yang memiliki arti penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemajuan dan program yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas juga memiliki arti luas yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban guna terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, maka muncul tuntutan pemerintah agar organisasi sektor publik dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pengelolaan

¹⁰ Kabul Setio Utomo, Sudarmo Setio -, and Didik G. Suharto, "Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 13, no. 1 (2018): 50, <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>.

¹¹ Edah Jubaedah, "Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi* VIII, no. 34 (2011): 288–99.

keuangan yang efektif memerlukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik dan akuntabilitas mencakup kewajiban dalam memberikan penjelasan dan tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan.¹² Dalam pandangan islam akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal yaitu kepada Allah SWT maupun secara horizontal kepada masyarakat, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap amanah yang telah dititipkan oleh Allah SWT.¹³ Akuntabilitas juga dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat” (Q.S An-Nisa’ Ayat 58)

Hubungan surat An-nisa Ayat 58 di atas dengan akuntabilitas cukup penting dan sejalan dengan dalil Al-qur'an yaitu, dalam ayat di atas mewajibkan seseorang yang diamanahi untuk menyampaikan amanahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan juga berlaku adil, secara

¹² Dwi Nur Saputra, Ana Sopanah, and Khojanah Hasan, “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDes) Di Desa Dengkol (Studi Kasus Pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang),” *NCAF (Proceeding of National Conference on Accounting & Finance)* 3 (2021): 238–52, <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art21>.

¹³ Mahle Muhammad Ridwan Nasirwan, “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BERBASIS BAGI HASIL (ANALISIS TERHADAP KARyAWAN ToKo DI KoTA BEUREUNUEN),” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 1–20, <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.180>.

umum akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Pengelolaan keuangan desa dalam penerapan akuntabilitas menurut perspektif islam dapat terlaksana apabila dalam penerapannya pemerintah desa dapat menyampaikan suatu amanah dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.¹⁴

Pengawasan pada pengelolaan keuangan akan sangat membantu dalam menjalankan tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan sektor publik terkait dana desa pemerintah harus menyediakan ruang bagi masyarakat agar terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa tidak bisa dianggap sepele karena masyarakat merupakan objek dan subjek dari pembangunan. Tanpa adanya pengawasan dari masyarakat maka kemungkinan kegagalan dalam setiap pengelolaan akan ada. Bagaimanapun bentuknya, tujuan pengawasan adalah meningkatkan kemampuan setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dengan cara melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk menghindari terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maka peran serta masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan. Dengan adanya pengawasan langsung oleh masyarakat akan menekan terjadinya penyelewengan dana desa.

Setiap tahunnya pemerintah desa memperoleh Dana Desa yang cukup besar mencapai satu milyar pada setiap desa hal ini memberikan dampak yang positif bagi desa yaitu pengelolaan keuangan yang dapat disalurkan guna mewujudkan desa yang mandiri dan maju. Namun dengan keberadaan Dana Desa juga menimbulkan masalah. Mempertimbangkan anggaran dana desa yang diberikan setiap tahun dengan nominal yang besar, maka berkemungkinan terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Di Kabupaten

¹⁴ Hasan Basri, A. K. Siti Nabihah, and M. Shabri Abd Majid, "Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective," *Gadjah Mada International Journal of Business* 18, no. 2 (2016): 207–30, <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12574>.

Lampung Timur sendiri sudah beberapa kali adanya isu terkait penyelewengan Dana Desa. Pada Tahun 2022 korupsi anggaran dana desa Tahun 2019 oleh Kepala Desa Braja Gemilang yang mencapai kerugian negara sebesar 179 juta.¹⁵ Pada Tahun 2023 diduga korupsi Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar 155 juta oleh mantan Kepala Desa Braja Sakti¹⁶ dan penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Trisinar sebesar 246 juta¹⁷

Desa Maringgai merupakan desa yang terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Desa Maringgai menyatakan bahwa terdapat keraguan terkait pengelolaan dana desa yang kurang maksimal, adanya pembangunan yang dinilai janggal¹⁸ informasi keuangan hanya di tempel pada papan pengumuman yang berada di balai desa sehingga adanya keterbatasan akses, dan belum memiliki website resmi desa yang memuat laporan keuangan terkait pengelolaan dana desa secara jelas yang bisa diakses dengan mudah oleh publik, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat akan peran penting dirinya dalam pemantauan dana desa. Sehingga dengan besarnya dana desa yang diberikan peneliti merasa perlu adanya analisis lebih lanjut terkait transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. Pengelolaan dana desa adalah serangkaian kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan,

¹⁵ RMOLLAMPUNG, "Diduga Korupsi Dana Desa, Kejari Lamtim Tahan Kades Braja Gemilang," Korupsi Rp179 Dana Desa, Kades Di Lampung Timur Divonis Satu Tahun Penjara, 2022, <https://www.rmollampung.id/korupsi-rp179-dana-desa-kades-di-lampung-timur-divonis-satu-tahun-penjara>.

¹⁶MursalinYasland, "Https://News.Republika.Co.Id/Berita/Rujla8463/Diduga-Korupsi-Mantan-Kepala-Desa-Braja-Sakti-Lampung-Timur-Kabur-Ke-Kalimantan-Tengah,"

¹⁷ Tommy Saputra, "Https://Www.Detik.Com/Sumbagsel/Hukum-Dan-Kriminal/d-7205834/Korupsi-Dana-Desa-Rp-246-Juta-Kades-Di-Lampung-Timur-Ditangkap,"

¹⁸ M. Ismail, "Kades Maringgai Diduga Simpangkan DD, Warga Mulai Bergejolak," Handal Online, 2022, <https://handalonline.com/2022/02/18/kades-maringgai-diduga-simpangkan-dd-warga-mulai-bergejolak/>.

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan sangat penting dalam mengukur keberhasilan suatu program serta diperlukannya pengawasan langsung oleh masyarakat untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Menurut perspektif islam, untuk mencapai kegiatan pengelolaan dana desa yang baik maka prosesnya harus diikuti dengan benar yaitu dengan menerapkan keterbukaan dan tidak sembarangan serta dengan arah kerja yang jelas dan landasan yang kokoh sehingga segala kegiatannya akan diridhoi dan diberi petunjuk oleh Allah SWT.

Penelitian terkait topik ini sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu dengan hasil yang berbeda-beda. Pada variabel akuntabilitas telah diteliti oleh Andika Subandra dkk¹⁹ dengan hasil akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa hasil ini sejalan dengan penelitian Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga, dan Iwan Hermansyah dkk, namun berbeda dengan hasil penelitian Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari, dan Pingki Veronika dan Nugraeni. Sedangkan pada variabel transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa seperti pada penelitian Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga, dan Prihasantyo Siswo Nugroho dkk namun berbeda hasil dengan penelitian Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani²⁰

Penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan keuangan dengan variabel pengawasan masih jarang ditemui sehingga menjadi *research gap* dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini memiliki perbedaan waktu dan tempat penelitian. Berdasarkan adanya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu dan fenomena yang sudah dipaparkan di

¹⁹ Meilano, "JAAB : Jurnal of Applied Accounting And Business," *Sistem Pengelolaan Penjualan Dan Pemesanan Berbasis Web Di Bumdes Lestari Jaya* 2, no. 1 (2020): 33–42.

²⁰ Chyntia Ambar Sugiharti and Swarmilah Hariani, "Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 1 (2021): 11–18, <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>.

atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Menurut Perspektif Islam (Studi Pengelolaan Dana Desa di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah pemanfaatan dana desa yang dirasa belum maksimal terkait pengelolaan dana desa pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini ditetapkan batasan masalah dengan tujuan agar dapat memperoleh suatu penyelesaian permasalahan yang berfokus pada titik masalah yang ada. Adapun titik masalah yang ditetapkan adalah:

- a. Penelitian dibatasi pada variabel (x) akuntabilitas, transparansi dan pengawasan serta variabel (y) pengelolaan keuangan sektor publik menurut perspektif islam.
- b. Penelitian dilakukan pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
4. Apakah transparansi, akuntabilitas dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
5. Bagaimana perspektif islam terkait transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengawasan secara simultan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.
5. Untuk mengetahui bagaimana perspektif islam terkait transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik pada Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar (S1) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dan menambah wawasan penulis mengenai transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik.

b. Bagi Perangkat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik sehingga dapat memberikan kontribusi untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan pengawasan lebih baik lagi.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran dalam pengembangan disiplin ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dan menjadi sumber bacaan bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan dengan ringkas dikarenakan penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama. Namun terdapat perbedaan pada variabel, objek, metode, dan periode waktu sehingga terdapat hal yang tidak sama yang dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis(Tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Christa Yunita Garung dan Linda Lomi Ga (2020). Jurnal Akuntansi Transparansi dan Akuntabilitas, Maret 2020, Vol. 8, No.1 Hal.19-27	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
2.	Herianti dan Arifin (2020) Jurnal Al-Tsarwah Vol. 3 No. 1, Juni 2020	Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi & akuntabilitas pemerintah Desa di Kecamatan Palakka sudah transparan & akuntabel meskipun belum sepenuhnya maksimal.
3.	Nurdamasih, Anantawikra dan Tunggal Atmadja	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah dilaksanakan

	(2019) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 10, No 1 Tahun 2019 e-ISSN: 2614- 1930	Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambaha n	dengan baik.
4.	M.Fahisa dan M. Afriyenti (2023) Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 5, No 2, Mei 2023, Hal 745-757 e-ISSN : 2656- 3649	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
5.	Fitri Sukamwati dan Alfi Nurfutriani (2021) Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM Vol. 2, No.1, Juni 2019	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh secara persial terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan

			keuangan desa.
6.	Filda dan Sapari (2020) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 9, No. 5 Mei 2020	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan	Hasil penelitian mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD tidak berpengaruh positif, dan kebijakan desa berpengaruh positif, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.
7.	R. Nababan, M. Sihombing dan Thamrin (2018) Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Vol 4, No. 1 2018 ISSN 2460-4585 ISSN 2460-4593	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep <i>Value For Money</i> pada Pemerintah di Kabupaten Dairi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan berkonsep value for money.
8.	Vini Agustina (2020) Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vol. 1 Hal 1-	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana	Hasil penelitian mengemukakan bahwa secara persial akuntabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap pengelolaan

	20	desa pada desa gunungbatu	keuangan ADD. Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan ADD dan secara simultan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.
9.	A.Making dan Handayani (2021) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6, No. 1 e-ISSN: 2460-0585	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian mengemukakan bahwa akuntabilitas dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, namun transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
10.	Rama Linda, Andi dan Raodahtul Jannah (2022) Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No 2	Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian mengemukakan bahwa secara persial akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan sifat amanah tidak dapat memoderasi

			pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.
11	Mirdawan Herman, (2022) Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Malangke	Hasil penelitian mengemukakan bahwa Transparansi yang diterapkan pada Desa Malangke sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Sedangkan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan
12.	Ediska Harpsa. Witra dan Rita Dwi (2022) Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis Vol. 2, No. 3, Agustus 2022 e-ISSN: 2962-4797 p-ISSN: 2962-3596	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Seluruh Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Transparansi dan akuntabilitas secara persial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Dan secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sumber: Data diolah tahun 2024

Dalam ringkasan penelitian terdahulu terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh :

1. Penelitian oleh Christa Yunita Garung dan Linda Lomi Ga, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel pengawasan dan objek penelitian.²¹
2. Penelitian oleh Herianti dan Arifin, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta pada variabel pengawasan.²²
3. Penelitian oleh Nurdamasih, Anantawikra dan Tunggal Atmadja, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu pada objek penelitian, metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta menambahkan variabel pengawasan.²³
4. Penelitian oleh M.Fanisha dan M. Afriyenti, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu mengganti variabel partisipasi masyarakat dengan variabel pengawasan dan objek penelitian.²⁴

²¹ Christina Yunnita Garung and Linda Lomi Ga, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka," *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 19–27, <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.

²² Herianti Arifin S, "Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 Di Kecamatan Palaka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam," *IAIN BONE*, 2018.

²³ dkk Nurdarmasih, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan," *Dalam JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* Volume 10, no. 1 (2019): 208–17.

²⁴ Moudiana Fahisa and Mayar Afriyenti, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Pada Nagari Di Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, no. 2 (2023): 745–57, <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>.

5. Penelitian oleh Fitri Sukamwati dan Alfi Nurfitriani, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel pengawasan dan objek penelitian.²⁵
6. Penelitian oleh Filda dan Sapari, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel pengawasan, variabel pengelolaan dana desa dan objek penelitian.²⁶
7. Penelitian oleh R. Nababan, M. Sihombing dan Thamrin, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel pengawasan dan objek penelitian.²⁷
8. Penelitian oleh Vini Agustina, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yaitu pada variabel pengawasan dan objek penelitian.²⁸
9. Penelitian oleh A. Making dan Handayani, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.²⁹

²⁵ Sugiharti and Hariani, "Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa."

²⁶ Filda Gean Rosiana Dewi and Sapari, "Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 5 (2020): 1–20.

²⁷ Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, and Husni Thamrin, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi, Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Di Kabupaten Dairi," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 4, no. 1 (2018): 108, <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157>.

²⁸ Vini Agustiana, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 1 (2020): 1–20, <https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMA/article/download/113/100>.

²⁹ Andreani Avellyni Making and Nur Handayani, "PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 1 (2021): 11–18,

<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4314%0Ahttp://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4314/4327>.

10. Penelitian oleh Rama Linda, Andi dan Raodahtul Jannah, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel sifat amanah dan objek penelitian.³⁰
11. Penelitian Oleh Mirdawan Herman, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel pengawasan dan objek penelitian.³¹
12. Penelitian oleh Ediska Harpsa, Witra dan Rita Dwi, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel pengawasan dan objek penelitian.³²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah kerangka penulisan dari penelitian ini, dimana antara sub bab lainnya memiliki korelasi yang kuat, berikut sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab I, penulis menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan.

BAB II : Landasan Teori Dan Pengujian Hipotesis

Pada Bab II, Penulis akan menguraikan teori yang menjadi landasan dalam melakukan

³⁰ Rama Linda Septian, Andi Wawo, and Raodahtul Jannah, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 2 (2022): 179–93, <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>.

³¹ Mirdawan Herman, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Malange," 2021.

³² Ediska Harosa Putri, Witra Maison, and Rita Dwi Putri, "PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris Seluruh Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok)," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 2, no. 3 (2022): 164–84, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i3.314>.

penelitian. Pada bab ini juga akan mencakup kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

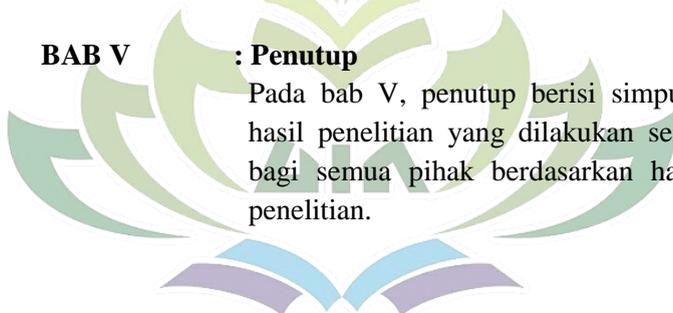
Pada Bab III, Penulis akan menguraikan terkait metodologi penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada Bab IV, Penulis menyajikan hasil data yang telah diolah, analisis dan interpretasi data serta membuktikan hipotesis penelitian.

BAB V : Penutup

Pada bab V, penutup berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran bagi semua pihak berdasarkan hasil hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. *Stewardship Theory*

Stewardship theory atau teori pengelolaan adalah teori yang berfokus pada organisasi maupun perusahaan untuk membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan. Teori ini menggambarkan dimana pihak manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu namun lebih ditujukan untuk tujuan organisasi. Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik karena organisasi sektor publik adalah organisasi yang dipersiapkan untuk memenuhi keperluan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, hubungan tersebut muncul karena adanya sifat manusia yang bertanggungjawab, dapat dipercaya, berintegritas dan jujur terhadap pihak lain. Berdasarkan teori ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan guna memenuhi kepentingan masyarakat. *Stewardship theory* memandang bahwa manajemen organisasi akan bertindak dengan penuh kesadaran dan bijaksana bagi kepentingan organisasi.³³

Hubungan teori *stewardship* dalam penelitian ini terkait transparansi adalah pemerintah desa diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan dengan baik, dengan menyediakan informasi yang transparan mengenai aktivitas pengelolaan keuangan, serta menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun hubungan akuntabilitas dengan teori *stewardship* adalah ketika pemerintah desa diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam mencapai visi dan misinya, yaitu

³³ and Lex Donaldson Davis, James H, F.David Schoorman, "*Toward a Stewardship Theory of Management*" *Academy of Management Review*, (Vol. 22, No. 1, 1997).

mengelola keuangan dengan baik yang juga harus diiringi dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Teori *stewardship* juga sangat relevan dengan pengawasan dalam mengelola dana desa. Ketika pemerintah menyadari kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana desa pemerintah mengakui tanggungjawab untuk mengelola dana tersebut dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pengawasan oleh masyarakat menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan, akuntabel dan efisien. Dengan adanya pengawasan langsung oleh masyarakat maka akan menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa. Sehingga hubungan teori *stewardship* dengan pengawasan adalah keduanya saling mendukung dalam terciptanya pengelolaan keuangan sektor publik yang baik. Dapat disimpulkan implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini adalah dapat menjelaskan peran penting pemerintah desa yang menjadi wadah aspirasi bagi masyarakatnya.³⁴

2. Teori Max Weber

Max Weber merupakan teori tindakan sosial yang merupakan tindakan individu dan memiliki makna ataupun arti secara subjektif bagi dirinya dan orang lain. Teori ini berorientasi pada tujuan individu maupun kelompok. Weber mengungkapkan bahwa cara terbaik untuk memahami kelompok adalah memahami tindakan yang dilakukannya sebagaimana memahami alasan masyarakat dalam bertindak melakukan pengawasan dana desa. Weber mengemukakan empat tipe tindakan sosial yaitu: Tindakan rasional instrumental adalah suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu

³⁴ Sri Ayem and Enti Fitriyaningsih, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Forum Ekonomi* 24, no. 2 (2022): 446–63, <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10869>.

tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada, kedua tindakan rasional nilai adalah tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang di pertimbangkan secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan, tindakan afektif adalah suatu tindakan yang terjadi secara spontan atau refleksi yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar dan terakhir tindakan tradisional adalah tindakan karena kebiasaan atau tradisi. Tindakan tersebut dilakukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan.³⁵

3. Transparansi

a). Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang menjamin akses bagi siapa saja untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah.³⁶ Selanjutnya, Mustopa Dijaja menyatakan transparansi merupakan keterbukaan pemerintah publik dalam memutuskan kebijakan-kebijakan sehingga masyarakat mengetahuinya. Pada akhirnya, transparansi dapat menciptakan akuntabilitas antara rakyat dengan pemerintah.³⁷ Selain itu, menurut Abdul Hafiz Tanjung, Transparansi adalah memberikan keterbukaan informasi dan jujur pada publik berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait akuntabilitas pemerintah dalam mengoperasikan sumber daya

³⁵ Melis Natasya Putri et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur" 4 (2023): 284–98.

³⁶ Ruslan Abdul Ghofur et al., "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1867–70, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>.

³⁷ Nining Nurmantari Usman, Jaelan Usman, and Abdi, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan Sim) Di Kantor Satlantas Polrestabes Makassar," *Administrasi Publik* 2, no. 2 (2016): 195–205.

yang diamanahkan kepadanya dan terkait kepatuhannya terhadap perundang-undangan.³⁸

Demikian juga menurut Mardiasmo, Transparansi dibangun sebab kebebasan mendapatkan informasi, dimana informasi ini adalah informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan kepentingan publik yang dapat diperoleh secara langsung dan mudah bagi masyarakat yang memerlukannya. Mardiasmo menyatakan tujuan transparansi dalam pemerintahan desa yaitu:

- 1) Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- 2) Upaya dalam meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah.
- 3) Upaya dalam meningkatkan manajemen pengelolaan penyelenggaraan pemerintah serta mengurangi tingkat kesempatan praktek KKN.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian transparansi adalah keterbukaan sungguh-sungguh dan menyeluruh terkait informasi dalam proses operasional sumber daya yang ada. Transparansi merupakan suatu pengawasan pengambilan keputusan maupun pelaksanaan aktivitas yang dikerjakan oleh pengelola organisasi publik. Dalam penerapannya, pengelola organisasi publik mesti memberi kemudahan akses informasi pada masyarakat, media, dan lingkungan. Dengan adanya penerapan transparansi dipastikan dapat meningkatkan kepercayaan publik pada organisasi tersebut.³⁹

b). Prinsip-Prinsip Transparansi

Terdapat enam prinsip transparansi yang di kemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) :

- 1) Terdapat informasi yang mudah di akses dan di pahami.

³⁸ Siregar, Hasibuan, and Erhan, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 1 Tanjungbalai."

³⁹ Lisnawati, "PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN DONATUR Studi Pada Masjid Ad Dua Way Halim Bandar Lampung," 2023.

- 2) Adanya publikasi mengenai aktivitas kegiatan dan rincian keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam mengembangkan proyek yang dapat diakses oleh publik.
- 4) Laporan Tahunan.
- 5) Website ataupun media publikasi organisasi.
- 6) Pedoman dalam menyebarkan informasi.

Menurut Mustopa Dijaja, prinsip transparansi tidak hanya memiliki hubungan dengan sesuatu yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi lima hal sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat juga diperbolehkan mengemukakan pendapatnya.
- 2) Keterbukaan informasi terkait dokumen yang perlu diketahui masyarakat.
- 3) Keterbukaan prosedur (penyusunan rencana atau pengambilan keputusan).
- 4) Keterbukaan register yang bersifat hukum (catatan sipil, buku tanah dan lain sebagainya).
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Menurut Kristianten, transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran yang merupakan hak masyarakat. Diantaranya yaitu:

- 1) Hak untuk mengetahui
- 2) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- 3) Hak dalam mengemukakan pendapat
- 4) Hak untuk diberi informasi.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, terdapat informasi yang mudah dipahami masyarakat, adanya publikasi kegiatan pengelolaan keuangan desa kepada

⁴⁰ Tri Purwanti, "Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara)," *Jurnal Professional* 9, no. 1 (2022): 133–42.

masyarakat untuk memperoleh haknya dalam mengetahui keuangan yang dikelola oleh perangkat desa dan laporan berkala yang diterbitkan oleh desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. Prinsip transparansi mewujudkan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat.

c). Indikator Transparansi

Menurut Kristianten transparansi mengarah pada pemberian dan penyediaan informasi untuk masyarakat umum. Indikator yang dapat digunakan pada prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah:

1) Keterbukaan proses

Yaitu bagaimana organisasi sektor publik dapat menyediakan informasi yang akurat dengan akses yang mudah bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun pihak yang memiliki wewenang dalam memperoleh informasi terkait rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir dengan pertanggungjawaban kegiatan.

2) Informasi jelas dan lengkap.

Yaitu penyediaan informasi yang mudah dipahami dan tidak ambigu, relevan tidak terlambat karena dapat mengurangi nilai atau dampaknya, serta informasi tersebut terpercaya, memastikan informasi yang disampaikan adalah benar adanya dan lengkap disertai adanya informasi detail keuangan desa, dan laporan berkala mengenai pengelolaan dana desa.

3) Keterbukaan akses informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan sektor publik.

Adalah kemudahan akses bagi publik dalam mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan. Dengan menerapkan keterbukaan

informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan sektor publik, akan meningkatkan kredibilitas pemerintah dan kepercayaan masyarakat.

4). Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Yaitu upaya dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, dengan mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah rencana anggaran dan diberi hak untuk bersuara.⁴¹

d). Transparansi Menurut Perspektif Islam

Dalam islam transparansi berarti *shiddiq*, yang artinya jujur yakni menyampaikan kenyataan sebenarnya sehingga dapat dipercaya oleh orang lain. Prinsip transparansi sesuai dengan Firman Allah SWT yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَارِبٌ مَسْئُولًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S Al-Isra’ Ayat 34)

Dan Allah berfirman hendaklah kamu menyempurnakan takaran saat kamu menakar dan jangan sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian juga kamu harus berlaku jujur dan adil dalam menimbang dengan

⁴¹ Raffleo Dilago, Johny Lumolos, and Welly Waworundeng, “Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara,” *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–9.

menggunakan neraca yang benar. Sikap tersebut lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.⁴²

Transparansi juga memiliki makna yang sama dengan *tabligh*, dimana Firman Allah SWT yaitu:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

“Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir”. (Q.S Al-Maidah Ayat 67)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek dalam sistem pengelolaan keuangan sektor publik yang baik. Transparansi menuntut adanya pertanggungjawaban terbuka, aksesibilitas terhadap laporan keuangan dengan mudah serta adanya publikasi terkait laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja lembaga.

4. Akuntabilitas

a). Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan proses evaluasi terhadap kinerja organisasi pada masa mendatang.⁴³

Menurut standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas

⁴² Mahlel, “Akuntabilitas Dan Transparansi Kompensasi Karyawan Berbasis Bagi Hasil” (Skripsi, Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan, 2017)

⁴³ Eni Dwi Susliyanti, “Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul,,” *Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul* 20, no. 1 (2017): 13–23.

merupakan pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik.⁴⁴ Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dimana setiap proses penganggaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan untuk setiap kegiatan yang sudah dilakukan dari awal hingga akhir sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Demikian pemerintah dengan masyarakat, dimana terdapat kontrak antara masyarakat dengan pemerintah untuk mengoperasikan kebijakan dan program, konsekuensinya pemerintah harus mampu memberikan penjelasan-penjelasan atas aktivitas yang sudah dilakukan kepada setiap masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

Akuntabilitas menjadi salah satu isu penting kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Akuntabilitas sendiri menjadi konsep yang terfokus pada kemampuan organisasi sektor publik untuk bisa memberikan jawaban kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan organisasi tersebut. Pada pemaparan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan bagaimana suatu organisasi dapat memberikan penjelasan atas kinerja yang telah dilakukan.⁴⁵ Dengan adanya pertanggungjawaban publik dapat membuat pengelola keuangan menjadi lebih tertib dalam pelaporannya. Akuntabilitas juga

⁴⁴ Afista Nur Khasanah and Ichwan Marisan, "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)," *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 32–48, <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>.

⁴⁵ Kristian Widya Wicaksono, "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik," *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 19, no. 1 (2015): 17, <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>.

menjadi alat untuk mengontrol terutama dalam memperoleh hasil pelayanan publik. Dalam hal ini, dibutuhkan evaluasi kerja yang dilaksanakan agar dapat diketahui sejauh mana perolehan hasil dan langkah-langkah yang digunakan dan kebijakan yang ditetapkan dengan memikirkan dampak di masa depan.

b). Aspek-Aspek Akuntabilitas

- 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)

Maksudnya adalah hubungan antara kedua belah pihak antara individu/kelompok dalam lembaga dengan Negara dan masyarakat. Pihak yang berwenang akan bertanggungjawab dalam mengarahkan, membimbing, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada sisi yang lain individu/kelompok akan bertanggungjawab pada masyarakat dan Negara. Oleh karena itu dalam prinsipnya hubungan yang terjalin adalah hubungan yang sama sama bertanggungjawab di kedua belah pihak.

- 2) Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil (*Accountability is result oriented*)

Pada aspek ini akuntabilitas mengharapkan hasil seperti sikap aparatur yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks tersebut setiap kelompok maupun perorangan dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan berupaya memberikan kontribusi agar tujuan organisasi tercapai.

- 3) Akuntabilitas Membutuhkan adanya Laporan (*Accountability requires reporting*)

Laporan yang dimaksud dalam hal ini adalah laporan kinerja. Laporan kinerja tersebutlah yang

merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas. Dengan adanya laporan kinerja, akan dapat menjelaskan tindakan dan hasil yang dilaksanakan.

- 4) Akuntabilitas Memerlukan Konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*)

Akuntabilitas merupakan kewajiban, yang didalamnya menunjukkan adanya tanggung jawab, dan tanggungjawab tersebut akan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa *reward* maupun sanksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

- 5) Akuntabilitas Memperbaiki Kinerja (*Accountability improves performance*)

Tujuan utama akuntabilitas ini adalah memperbaiki kinerja organisasi maupun individu pada suatu lembaga, terdapat sikap yang proaktif (*proactive accountability*) dalam akuntabilitas, sehingga dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Pada realitanya setiap individu maupun kelompok yang terlibat secara aktif akan dimintai pertanggung jawaban dalam evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya.⁴⁶

c). Asas-Asas Akuntabilitas

Dalam pelaksanaannya akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas berikut:

- 1) Komitmen pemimpin dan semua staf instansi untuk bertindak dengan akuntabel.

Dengan komitmen pimpinan dan staf instansi dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi,

⁴⁶ M Prihatin and F Mustaqim, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Lahumoko ...," *Entries* 5 (2023): 18–36, <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/3590%0Ahttp://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/download/3590/1847>.

mencegah adanya pelanggaran etika, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

- 2) Menjamin penggunaan sumber daya dengan konsisten sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menghindari risiko hukum, dapat membangun reputasi yang baik, dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma yang berlaku.
- 3) Meningkatkan tujuan dan sasaran yang dibuat. Organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan terus meningkatkan tujuan, sasaran dan memastikan visi relevan dan tercapai.
- 4) Berorientasi pada visi, misi dan hasil yang didapatkan. Dengan begitu organisasi akan mencapai kesinambungan, dan membantu mengarahkan setiap tindakan menuju pencapaian tujuan.
- 5) Jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai instrumen perubahan manajemen lembaga pemerintah.⁴⁷

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa segala bentuk kegiatan yang dijalankan dan hasil akhirnya mesti dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik wewenang tertinggi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asas-asas akuntabilitas merupakan tanggungjawab yang harus dipegang oleh pengambil keputusan sehingga hasil dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

⁴⁷ Sedarmayanti, GOOD Governance “*Kepemerintahan yang Baik*”, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 70-71

d). Indikator Keberhasilan Akuntabilitas

Berikut terdapat beberapa indikator dalam keberhasilan akuntabilitas yakni:

- 1) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.
- 2) Menimbulkan masyarakat yang antusias dalam menilai kinerja pemerintah desa.
- 3) Menurunnya kasus KKN di pemerintahan desa.

Berdasarkan indikator-indikator yang sudah disebutkan, Menurut Dadang Solihin indikator dalam penelitian ini adalah:

- 1). Kesesuaian standar pelaksanaan dengan kenyataannya. Hal ini merujuk pada sejauh mana organisasi dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, serta sejauh mana realitas pelaksanaan mencerminkan atau mematuhi standar tersebut.
- 2). Terdapat sanksi atas kelalaian oleh tim pelaksana, yakni untuk memastikan keuangan dikelola dengan baik dan pihak yang melanggar mendapatkan sanksi yang ditentukan atas penyelewengan pelaksanaan, yaitu kembali pada konsekuensi atau hukuman yang diberlakukan untuk individu maupun kelompok pada pedoman yang sudah ditetapkan bersama oleh organisasi.
- 3). Terdapat laporan pertanggungjawaban, guna mengukur keberhasilan program yang telah dijalankan sebab menjalankan amanah harus disertai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ Alfitiana Dyah Novitasari and Priyatno Harsasto, "Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2019): 121–30, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/26345/23290>.

e.) Akuntabilitas Menurut Perspektif Islam

Islam mempunyai pandangan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban manusia sebagai *khalifah* di bumi kepada Allah SWT, karena apapun yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya” (Q.S Al-Muddassir Ayat 38)

Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surah An-Nisa : 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada mereka yang memiliki hak menerimanya, dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan seadil-adilnya. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, Maha melihat”.

Ayat Al-qur'an diatas menerangkan dua kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi yaitu memberikan amanah kepada yang wajib menerima yakni diperuntukkan bagi mereka yang memperoleh kepercayaan dan orang yang memegang urusan yang mengatur hak-hak manusia. Selanjutnya memberi keputusan hukum antara manusia dengan dalil atau menyampaikan kebenaran kepada pemiliknya, serta mencegah orang mengambil hak itu dan merebut darinya untuk kemudian diberikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, menurut Maisyah Kholmi

konsep akuntabilitas memiliki tiga elemen yaitu hubungan manusia dengan manusia (*habluminannas*), hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*). Dalam hal ini Allah merupakan pusat tertinggi pemberi amanah dan manusia sebagai penanggung jawab atas apa yang telah diperbuat dalam mengelola bumi Allah SWT.⁴⁹ Pertanggungjawaban amat ditegaskan dalam firman Allah melalui istilah *hisab* (akuntabilitas) pada hari pembalasan. Dengan ini pemerintah akan lebih memperhatikan kepentingan sosial daripada kepentingan pribadinya. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan dengan terbuka melalui akuntabilitas kepada masyarakat.

5. Pengawasan

a) Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi yang menjamin bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan output seperti yang diinginkan⁵⁰. Selanjutnya, menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diatur pengawasan yang bersama dengan pembinaan, menyatakan bahwa pengawasan adalah semua kegiatan penelitian terhadap objek pemeriksaan, dengan harapan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁵¹

Pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya guna oleh pemimpin organisasi terhadap

⁴⁹ Maisyah Kholmi, "Akuntabilitas Dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam" 15 (2018).

⁵⁰ R Didi Djadjuli, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai," *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai* 4, no. 567–568 (2019): 565–73.

⁵¹ Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang No 32 Tahun 2004, "Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah," *Dpr*, 2004, 249, <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.

sumber-sumber kerja untuk diketahui kelemahan dan kekurangannya supaya dapat diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang guna tercapainya tujuan organisasi⁵².

Menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa adalah tindakan untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin serta partisipatif sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu aspek dari pengawasan adalah pemeriksaan, dengan adanya pemeriksaan dapat menilai apakah pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan berjalan dengan semestinya. Hakikat adanya pengawasan adalah untuk mengamati apa yang terjadi dan membandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga jika terdapat indikasi penyelewengan dapat segera diperbaiki.⁵³

Pengawasan dalam pengelolaan dana desa dapat optimal, jika pengelola dana desa yang bersifat jujur bekerjasama dengan pendamping desa yang dikaderkan oleh kementerian desa dalam membantu program dana desa yang tepat sasaran. Pendamping desa dapat dilakukan oleh pendamping ahli, pendamping profesional, pendamping teknis, dan pendamping pemberdayaan masyarakat.⁵⁴

Penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2016 menegaskan bahwa salah satu kegiatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah melakukan pengawasan dana desa. Selain itu masyarakat juga berperan untuk mengawasi kinerja kepala desa khususnya dalam mengelola keuangan desa. Jadi

⁵² M Lukas et al., "Effect of Supervision, Leadership and Compensation To Employees Performance in the Financial Management Agency and Regional Goods of Regency of North Minahasa," *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017): 1921–28.

⁵³ Kementerian Dalam Negeri, "Permendagri No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa," *Permendagri 73 Tahun 2020*, 2020.

⁵⁴ Eva Julita and Syukriy Abdullah, "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 213–21, <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>.

masyarakat desa dapat mengawasi dana desa secara bersama-sama atau melalui BPD. BPD dan masyarakat desa merupakan pengawas yang paling efektif karena melihat dengan langsung bagaimana program desa berjalan.⁵⁵

b) Indikator Pengawasan

Indikator yang digunakan dalam kegiatan pengawasan menurut Jufrize terdapat tiga indikator, yaitu:

1) Menentukan Ukuran Pelaksanaan

Yaitu cara dalam mengukur ataupun membandingkan apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan. Melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu maupun beberapa kali dalam sebulan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa.

2) Memberikan Penilaian

Memberikan penilaian artinya menilai setiap pekerjaan yang diberikan, apakah pekerjaan sudah sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.

3) Mengadakan Korektif

Pengadaan korektif ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada, misalnya seperti standar yang terlalu tinggi dan memberikan sanksi terhadap penyimpangan.⁵⁶

c) Pengawasan Menurut Perspektif Islam

Pengawasan dalam pandangan islam adalah untuk menunjukkan apa yang salah, memperbaiki apa yang salah, dan membenarkan yang baik. Pengawasan

⁵⁵ Subbagian Hukum, B P K Perwakilan, and Provinsi Bengkulu, "Pemantauan Dan Pengawasan Dana Desa," *Preneur.Trubus.Id*, 2014, 1–17.

⁵⁶ Wono Sugito, Ardiansah Ardiansah, and Sudi Fahmi, "Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 9, no. 2 (2023): 111–22, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.301>.

dalam Al-Qur'an sering disebut dengan istilah *al-riqobah*. Istilah *al-Riqobah* diidentikkan dengan *al-Raqib*, sebagaimana dikatakan Ibnu Manzhur dalam *Lisanul 'Arab* menjelaskan bahwa nama Allah *al-Raqib* berarti maha penjaga/pengawas yang tidak satupun luput dari-Nya⁵⁷. Berikut firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ

الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

“Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada diantara mereka. Maka setelah engkau wafatkan, Engkaulah yang maha mengawasi mereka. Dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu” (Al-Maidah : 117).

Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surah An-Nisa : 1 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Sesungguhnya Allah maha mengawasi kamu sekalian”

Ayat Al-quran diatas menerangkan konsep bahwa kehidupan manusia tidak akan terlepas dari pengawasan Allah SWT. Pengawasan tersebut mencakup keseluruhan aspek kehidupan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Manusia diingatkan akan pertanggungjawaban mereka di akhirat, sehingga hal ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk hidup lebih baik. Dalam organisasi pengawasan harus terus dilakukan, sebab pengawasan merupakan pengecekan jalannya

⁵⁷ Abdus Salam Dz. Eef Saefulloh, *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*, 2019.

rencana organisasi agar terhindar dari kegagalan atau akibat yang lebih buruk.⁵⁸

6. Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

a) Pengertian Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Pengelolaan yaitu menggerakkan manusia untuk lebih efektif dan efisien dalam menggunakan material dan fasilitas yang ada. Pengelolaan Keuangan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mensyaratkan bentuk laporan pertanggungjawaban.⁵⁹ Pengelolaan keuangan sektor publik adalah hak dan kewajiban pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bernilai uang yang dikelola dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.⁶⁰ APBD dibahas, disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶¹

Salah satu organisasi sektor publik adalah pemerintahan desa yang bertugas mengelola keuangan desa diantaranya adalah dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat yang diberikan berdasarkan jumlah

⁵⁸ Abdus Salam Dz. Eef Saefulloh.

⁵⁹ Ersi S D A N Nengsih, "236681-Analisis-Pengaruh-Kinerja-Kuangan-Real-3D43375C" 10, no. 1 (2017): 48–67.

⁶⁰ Boedijono et al., "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso."

⁶¹ Riri Septyaningrum Putri et al., "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 60, <https://doi.org/10.29300/aj.v7i1.4071>.

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.⁶²

Perencanaan keuangan desa berhubungan dengan penganggaran dan masyarakat diharapkan ikut serta dalam pengambilan keputusan karena masyarakat yang lebih mengerti apa yang masyarakat butuhkan.⁶³ Dalam pengelolaan dana desa diatur oleh peraturan tentang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, PP No 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.⁶⁴

b) Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut indikator pengukuran dalam pengelolaan dana desa yaitu:

1) Perencanaan

Dalam tahap penyusunan perencanaan desa sesuai dengan wewenangnya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Pada musyawarah yang dilakukan ditetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh

⁶² Prihatin and Mustaqim, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Lahumoko"

⁶³ Serly Rahma Tiara et al., "ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE" 04, no. 01 (2023): 37–51.

⁶⁴ Suci Rahayu, "Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)," *Skripsi Universitas Medan Area*, 2024, 14.

anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dalam tahapan perencanaan kepala desa akan menyampaikan rancangan peraturan yang sudah dibuat oleh sekretaris desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya rencana yang sudah disepakati bersama akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat tiga hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota akan menyampaikan hasil evaluasi paling lambat 20 hari kerja.⁶⁵

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya akan dilakukan oleh tim pelaksana desa, selanjutnya untuk mendukung keterbukaan kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya wajib dilengkapi papan informasi yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan relevan. Bendahara menyimpan uang pada rekening kas untuk keperluan operasional desa dengan jumlah yang ditetapkan Bupati/Walikota.⁶⁶

3) Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa diwajibkan untuk mencatat segala transaksi kegiatan penerimaan dan pengeluaran dan tutup buku pada akhir bulan dengan tertib. Bendahara desa wajib

⁶⁵ Wahyu, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa," *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2018, 30.

⁶⁶ Wahyu.

mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan dan paling lambat sepuluh bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa menggunakan:

- a) Buku kas umum, digunakan untuk mencatat semua aktivitas penerimaan baik tunai maupun kredit
- b) Buku kas pembantu pajak, digunakan membantu buku kas umum terkait pajak.
- c) Buku bank, digunakan membantu buku kas umum yang berhubungan dengan bank.⁶⁷

4) Pelaporan

Pada tahap pelaporan kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan berupa:

- a) Laporan semester pertama, laporan realisasi anggaran yang disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan.
- b) Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat januari tahun berikutnya.⁶⁸

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban anggaran dana desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDdes penanggung jawab utama. Semua anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) akan disimpan oleh desa sebagai objek yang salinannya akan dikirim ke kecamatan.⁶⁹

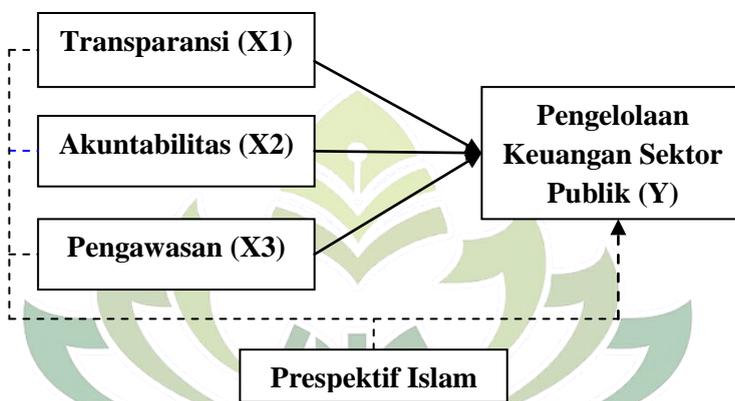
⁶⁷ Wahyu.

⁶⁸ Wahyu.

⁶⁹ Wahyu.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan rencana dalam penelitian yang akan digagas oleh peneliti. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pemikiran membantu peneliti dalam menemukan teori dalil, dan konsep-konsep yang akan dijadikan dasar penelitian. Dalam kerangka pemikiran terdapat variabel yang menjelaskan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dibahas. Berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini.⁷⁰



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap kemungkinan sebuah permasalahan penelitian. Hipotesis juga diartikan sebagai suatu harapan terkait kejadian-kejadian berdasarkan generalisasi hubungan yang telah diasumsikan di antara variabel-variabel.⁷¹ Hipotesis mempunyai fungsi penting dalam sebuah penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terkait pelaksanaan penelitian, maka dapat disimpulkan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah

⁷⁰ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, "Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif," *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.

⁷¹ Wahyu Hidayat Rand A Mohyi, "Metodologi Penelitian Ekonomi," *UMMPress*, 2020.

penelitian yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sehingga hipotesis yang digunakan ialah hipotesis statistik, dinamakan hipotesis statistik karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan populasi, sumber data yang menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi yang dipelajari ialah data sampel. Berikut ini adalah pengajuan hipotesis.

1) **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik**

Transparansi berasal dari kata transparan yang artinya jelas, nyata dan terbuka. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan ataupun akses bagi setiap orang dalam mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintah, dan hasil yang telah dicapai.⁷² Dalam hal ini pemerintah sebagai *stewardship* harus mengedepankan prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan keuangan kepada masyarakat (*principal*) untuk memperoleh informasi seluas-luasnya tanpa adanya keterbatasan terkait pengelolaan keuangan sektor publik guna tercapainya tujuan organisasi yaitu tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Krina transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintah, dengan adanya transparansi dalam kegiatan pemerintahan desa akan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap aparatur desa, sehingga manajemen akan memberikan kinerja yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maju Siregar Tahun 2020 menguji terkait bagaimana pengaruh transparansi dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa menunjukkan hasil yang positif dan signifikan antara transparansi dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa, sejalan dengan penelitian

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung, 2014).

yang dilakukan oleh Christa Yunita dan Linda Lomi⁷³ dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) Dalam Pencapaian *Good Governance* bahwa transparansi berpengaruh signifikan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Penelitian lain dengan judul Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah⁷⁴ Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Transparansi Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik.

2) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dalam suatu kinerja, serta tindakan pimpinan organisasi terhadap pihak yang memiliki wewenang dalam meminta pertanggungjawaban. Masyarakat sebagai *principal* memiliki wewenang untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak manajemen. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi amanah (*principal*) dimana

⁷³ Garung and Ga, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka."

⁷⁴ Atika Lusi Tania, "Urgensi Pedoman Akuntansi Pesantren Dalam Pelaporan Keuangan," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 02 (2021): 211, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i02.2388>.

akan menghasilkan suatu kegagalan atau keberhasilan dalam pelaksanaannya.⁷⁵

Akuntabilitas memiliki peran sebagai alat kontrol guna mengukur keberhasilan kinerja organisasi saat masa jabatannya untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah dikerjakan, dalam hal ini pertanggungjawaban berupa pelaporan pengelolaan keuangan yang dapat diandalkan. Sedangkan pengelolaan keuangan yang baik merupakan bagian dari akuntabilitas. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah lebih cenderung bertanggungjawab dan bekerja lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sukmawati⁷⁶ Tahun 2019 yang menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niken Ayu Saskia, Moh. Amin, & Junaidi Tahun 2020 dengan judul pengaruh kejelasan sasaran anggaran, perwujudan nilai transparansi, pengendalian akuntansi, akuntabilitas, *value for money* terhadap pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan simultan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik.⁷⁷ Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas Berpengaruh Secara Positif Dan Signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

⁷⁵ Ayem and Fitriyaningsih, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

⁷⁶ Sugiharti and Hariani, "Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa."

⁷⁷ Yulia Ningsih, Nur Diana, and M. Cholid Mawardi, "E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang," *E-Jra* 09, no. 02 (2020): 53–72.

3) Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Pengawasan merupakan proses mengamati setiap kegiatan dalam organisasi agar menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam teori Max Weber masyarakat bertindak dengan penuh kesadaran untuk melakukan pengawasan dana desa agar terwujudnya tujuan organisasi melalui pengelolaan keuangan yang baik. Pengawasan diartikan sebagai proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya apakah sesuai dengan rencana yang ditentukan. Dapat disimpulkan pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, untuk menjamin semua berjalan sebagaimana mestinya.⁷⁸

Menurut Winardi pengawasan bukan hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil pengawasan namun juga memperbaiki serta meluruskan sehingga tercapainya tujuan organisasi. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fredo Hasugian, Ricky Ary dan Aulia Rahman⁷⁹, Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Frisiane Lolowang, Fauzan Azima, Annie Mustika Putrid an Intan Putri Azhari⁸⁰, Welson Rompas dan Rully Mambo, dengan hasil pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana

⁷⁸ Frisiane J Lolowang, Welson Y. Rompas, and Rully Mambo, "Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kayuuwi Satu Kec. Kawangkoan Barat," *Jurnal Administrasi Publik* 56, no. 4 (2018): 1–15.

⁷⁹ Fredo T S P Hasugian, Ricky Ary Syahputra, and Aulia Rahman Harahap, "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah , Value For Money , Kejujuran , Transparansi , Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat)" 6, no. 2 (2021): 175–85.

⁸⁰ Stesie Federika Manisa, Jonhy Manaroinsong, and Mareyke Sumual, "Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 7, no. 2 (2020): 8–12, <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>.

desa di desa Kayuwi Satu.⁸¹ Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Pengawasan Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

4) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan dapat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik sebab pengimplementasian transparansi yang baik pada organisasi bertujuan sebagai media pemberi informasi yang bersifat komprehensif, informatif dan relevan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut terutama terkait informasi pengelolaan keuangan. Selain itu untuk mewujudkan pertanggungjawaban kepada masyarakat prinsip akuntabilitas harus diterapkan.⁸² Pengawasan merupakan jaminan supaya terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian jika transparansi, akuntabilitas dan pengawasan diterapkan dengan baik maka akan mempengaruhi pengelolaan keuangan sektor publik. *Stewardship Theory* dalam pengembangan hipotesis ini diasumsikan bahwa pemerintah desa yang hakikatnya dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat akan bertindak demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yassir, Mursalim dan Asriani Junaid Tahun 2022 yang menunjukkan

⁸¹ Lolowang, Rompas, and Mambo, "Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kayuwi Satu Kec. Kawangkoan Barat."

⁸² Lailatul Qodariah, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan Dan Keindahan Kota Palembang," *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2017.

bahwa akuntabilitas keuangan, pengawasan keuangan dan transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.⁸³ Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengawasan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik



⁸³ Yassir, Mursalim, and Asriani Junaid, “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan,” *YUME: Journal of Management* 5, no. 2 (2022): 477–94, <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.344>.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Abdullah, Karimuddin, Misbahul Jannah, Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Zahara Fadilla, Ns Taqwin, Masita, Ketut Ngurah Ardiawan, and Meilida Eka Sari. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. PT Rajagrafindo Persada*. Vol. 3, 2021. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.
- Abdus Salam Dz. Eef Saefulloh. *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Qur'an: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*, 2019.
- Aziza, Nurul. "Metodologi Penelitian 1 : Deskriptif Kuantitatif." *ResearchGate*, no. July (2023): 166–78.
- Davis, James H, F.David Schoorman, and Lex Donaldson. "Toward a Stewardship Theory of Management" *Academy of Management Review*,. Vol. 22, No. 1, 1997.
- Ghozali, Imam. "Processing Data Penelitian Menggunakan SPSS." *E-Book 1* (2018): 154.
- Panuluh, Fajar. "Buku Pintar Dana Desa." *Proposal SIMLITAMAS*, 2020, 8–37.
- Sihabudin, Danny Wibowo, Sri Mulyono, Jaka Wijaya Kusuma, Irvana Arofah, Besse Arnawisuda Ningsi, Edy Saputra, Ratni Purwasih, and Syaharuddin. *Ekonometrika Dasar Teori Dan Praktik Berbasis SPSS*, 2021.
- Solimun. "Multivariate Analysis: Struktural Equation Modelling (Sem), Lisrel, Dan Amos," 2002, 78.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung, 2014.

Sumber Jurnal

- Agustiana, Vini. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi 1* (2020): 1–20. <https://journal.stiepasim.ac.id/index.php/JMA/article/download/113/100>.
- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian." *Jurnal Pilar* 14, no. 1 (2023): 15–31.
- Ayem, Sri, and Enti Fitriyaningsih. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Forum Ekonomi* 24, no. 2 (2022): 446–63. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10869>.
- Basri, Hasan, A. K. Siti Nabiha, and M. Shabri Abd Majid. "Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective." *Gadjah Mada International Journal of Business* 18, no. 2 (2016): 207–30. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12574>.
- Boedijono, Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, and Venantya Asmandani. "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* 4, no. 1 (2019): 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>.
- Dewi, Filda Gean Rosiana, and Sapari. "Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 5 (2020): 1–20.
- Dilago, Raflianto, Johny Lumolos, and Welly Waworundeng. "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara." *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1–9.

- Djadjuli, R Didi. "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai." *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai* 4, no. 567–568 (2019): 565–73.
- Ediska Harosa Putri, Witra Maison, and Rita Dwi Putri. "PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris Seluruh Nagari Di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok)." *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 2, no. 3 (2022): 164–84. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i3.314>.
- Ekonomi, Ikonomika Jurnal, Bisnis Islam, Islamic Economics, Hanif Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, Iain Raden, and Intan Lampung. "Sistem Kompensasi Pns Berbasis Kinerja" 1, no. April (2016): 92–104.
- Eni Dwi Susliyanti. "Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul)." *Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul* 20, no. 1 (2017): 13–23.
- Fahisa, Moudiana, and Mayar Afriyenti. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Pada Nagari Di Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, no. 2 (2023): 745–57. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>.
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.
- Ghofur, Ruslan Abdul, Program Studi, Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1867–70.

<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi>:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>.

Hasugian, Fredo T S P, Ricky Ary Syahputra, and Aulia Rahman Harahap. “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah , Value For Money , Kejujuran , Transparansi , Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat)” 6, no. 2 (2021): 175–85.

Herman, Mirdawan. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Malange,” 2021.

Hukum, Subbagian, B P K Perwakilan, and Provinsi Bengkulu. “Pemantauan Dan Pengawasan Dana Desa.” *Preneur.Trubus.Id*, 2014, 1–17.

Jubaedah, Edah. “Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah.” *Jurnal Ilmu Administrasi VIII*, no. 34 (2011): 288–99.

Julita, Eva, and Syukriy Abdullah. “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 5*, no. 2 (2020): 213–21. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556>.

Kementerian Dalam Negeri. “Permendagri No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.” *Permendagri 73 Tahun 2020*, 2020.

Khasanah, Afista Nur, and Ichwan Marisan. “Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara).” *Jurnal Rekognisi Akuntansi 6*, no. 1 (2022): 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>.

Kholmi, Maisyah. “Akuntabilitas Dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam” 15 (2018).

Lailatul Qodariah. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Kebersihan Dan Keindahan Kota Palembang.” *Skripsi, Universitas*

Muhammadiyah Palembang, 2017.

- Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.
- Lisnawati. “PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KEPERCAYAAN DONATUR Studi Pada Masjid Ad Dua Way Halim Bandar Lampung,” 2023.
- Lolowang, Frisiane J, Welson Y. Rompas, and Rully Mambo. “Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kayuwi Satu Kec. Kawangkoan Barat.” *Jurnal Administrasi Publik* 56, no. 4 (2018): 1–15.
- Lukas, M, B Tewel, M D Walangitan, and Pengaruh Pengawasan..... “Effect of Supervision, Leadership and Compensation To Employees Performance in the Financial Management Agency and Regional Goods of Regency of North Minahasa.” *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017): 1921–28.
- Makalalag, Astri Juainita, Grace B Nangoi, and Herman Karamoy. “H3 H4 H5.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”* 8, no. 1 (2017).
- Making, Andreani Avellyni, and Nur Handayani. “PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 1 (2021): 11–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4314%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4314/4327>.
- Manisa, Stesie Ferderika, Jonhy Manaroinsong, and Mareyke Sumual. “Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)* 7, no. 2 (2020): 8–12. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>.
- Meilano. “JAAB : Jurnal of Applied Accounting And Business.”

Sistem Pengelolaan Penjualan Dan Pemesanan Berbasis Web Di Bumdes Lestari Jaya 2, no. 1 (2020): 33–42.

Nababan, Redi Antonius, Marlon Sihombing, and Husni Thamrin. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi, Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Di Kabupaten Dairi.” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 4, no. 1 (2018): 108. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157>.

Nasirwan, Mahle Muhammad Ridwan. “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BERBASIS BAGI HASIL (ANALISIS TERHADAP KARYAWAN ToKo DI KoTA BEUREUNUEN).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 1–20. <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.180>.

Nengsih, Ersi S D A N. “236681-Analisis-Pengaruh-Kinerja-Kuangan-Real-3D43375C” 10, no. 1 (2017): 48–67.

Ningsih, Yulia, Nur Diana, and M. Cholid Mawardi. “E-JRA Vol. 09 No. 06 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang.” *E-Jra* 09, no. 02 (2020): 53–72.

Normasyhuri, Khavid, Tulus Suryanto, and Riza Prayoga. “Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs): Tinjauan Ekonomi Islam.” *RELASI: Jurnal Ekonomi XVII*, no. 2 (2012): 173–85.

Novitasari, Alfitiana Dyah, and Priyatno Harsasto. “Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2019): 121–30. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/26345/23290>.

Nurdarmasih, dkk. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan.” *Dalam JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* Volume 10, no. 1 (2019): 208–17.

- Prihatin, M, and F Mustaqim. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Lahumoko” *Entries* 5 (2023): 18–36. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/view/3590%0Ahttp://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/download/3590/1847>.
- Purwanti, Tri. “Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara).” *Jurnal Professional* 9, no. 1 (2022): 133–42.
- Putri, Melis Natasya, Taufiq Ramdani, Farida Hilmi, Program Studi Sosiologi, and Universitas Mataram. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur” 4 (2023): 284–98.
- Putri, Riri Septyaningrum, Deki Fermansyah, Any Eliza, and Suharto Suharto. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 60. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4071>.
- Rahayu, Suci. “Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU).” *Skripsi Universitas Medan Area*, 2024, 14.
- Rizal, Said Muhammad, and Radiman Radiman. “Pengaruh Motivasi, Pengawasan, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai.” *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 2, no. 1 (2019): 117–28. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3649>.
- S, Herianti Arifin. “Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 Di Kecamatan Palkka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam.” *IAIN BONE*, 2018.
- Saputra, Dwi Nur, Ana Sopanah, and Khojanah Hasan. “Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

(APBDes) Di Desa Dengkol (Studi Kasus Pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).” *NCAF (Proceeding of National Conference on Accounting & Finance)* 3 (2021): 238–52. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art21>.

Septian, Rama Linda, Andi Wawo, and Raodahtul Jannah. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi.” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 2 (2022): 179–93. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>.

Setiyaningrum, Irma, and Isyroah. “The Influence of Accountability, Transparency, and Control Towards Budgeting Performance of Value for Money Concept At Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta.” *Jurnal PROFITA: Kajian Ilmu Akuntansi* 5, no. 3 (2017): 1–20.

Siregar, Oktarini Khamilah, Hasrul Azwar Hasibuan, and Astri Natasi Janu Erhan. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 1 Tanjungbalai.” *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 10, no. 1 (2019): 57–71. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/573>.

Sugiharti, Chyntia Ambar, and Swarmilah Hariani. “Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 1 (2021): 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>.

Sugito, Wono, Ardiansah Ardiansah, and Sudi Fahmi. “Pengawasan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir.” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 9, no. 2 (2023): 111–22. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.301>.

Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif.” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.

Tania, Atika Lusi. “Urgensi Pedoman Akuntansi Pesantren Dalam Pelaporan Keuangan.” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi*

Syariah 8, no. 02 (2021): 211.
<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i02.2388>.

Tiara, Serly Rahma, Yetri Martika Sari, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. "ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE" 04, no. 01 (2023): 37–51.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. "Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah." *Dpr*, 2004, 249.
<http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/33.pdf>.

Usman, Nining Nurmantari, Jaelan Usman, and Abdi. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan Sim) Di Kantor Satlantas Polrestabes Makassar." *Administrasi Publik* 2, no. 2 (2016): 195–205.

Utomo, Kabul Setio, Sudarmo Setio -, and Didik G. Suharto. "Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 13, no. 1 (2018): 50.
<https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>.

UU, N0 6. "Undang - Undang N0 6 Tahun 2014," 2014, 1–71.

Wahyu. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa." *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2018, 30.

Wahyu Hidayat Rand A Mohyi. "Metodologi Penelitian Ekonomi." *UMMPress*, 2020.

Warnilah, Ai Ilah. "Implementasi Alpha Cronbach Pada Pengembangan Pembelajaran Pengenalan Sampah Metode Mdlc." *Jurnal Produktif* 2, no. 1 (2018): 83–93.

Wenas, Josef H. "Munich Personal RePEc Archive MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCE IN INDONESIA : Review of Islamic Public Finance," no. 69525 (2016).

Wicaksono, Kristian Widya. "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 19,

no. 1 (2015): 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>.

Yahya, Idhar. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Sistem Teknik Industri* 7, no. 4 (2006): 27–29.

Yanto, Edi, and Aqfir Aqfir. “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa.” *Economy Deposit Journal (E-DJ)* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>.

Yassir, Mursalim, and Asriani Junaid. “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan.” *YUME: Journal of Management* 5, no. 2 (2022): 477–94. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.344>.

Sumber Website

Jaya, Djoni Hartawan. “Diduga Korupsi Dana Desa, Kejari Lamtim Tahan Kades Braja Gemilang.” *Lampungpost.Co Jendela Informasi Lampung*, 2021. <https://m.lampost.co/berita-diduga-korupsi-dana-desa-kejari-lamtim-tahan-kades-braja-gemilang.html>.

M. Ismail. “Kades Maringgai Diduga Simpangkan DD, Warga Mulai Bergejolak.” *Handal Online*, 2022. <https://handalonline.com/2022/02/18/kades-maringgai-diduga-simpangkan-dd-warga-mulai-bergejolak/>.

Saputra, Tommy. “<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7205834/korupsi-dana-desa-rp-246-juta-kades-di-lampung-timur-ditangkap>,”

Yasland, Mursalin. “<https://news.republika.co.id/berita/rujla8463/diduga-korupsi-mantan-kepala-desa-braja-sakti-lampung-timur-kabur-ke-kalimantan-tengah>,” n.d.

<https://quran.kemenag.go.id/> Diakses pada 18 Maret 2024. Pukul 22.05 wib.